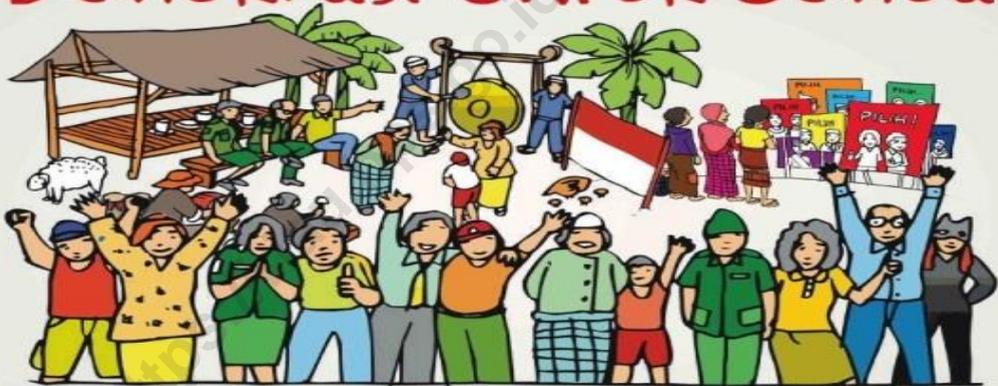


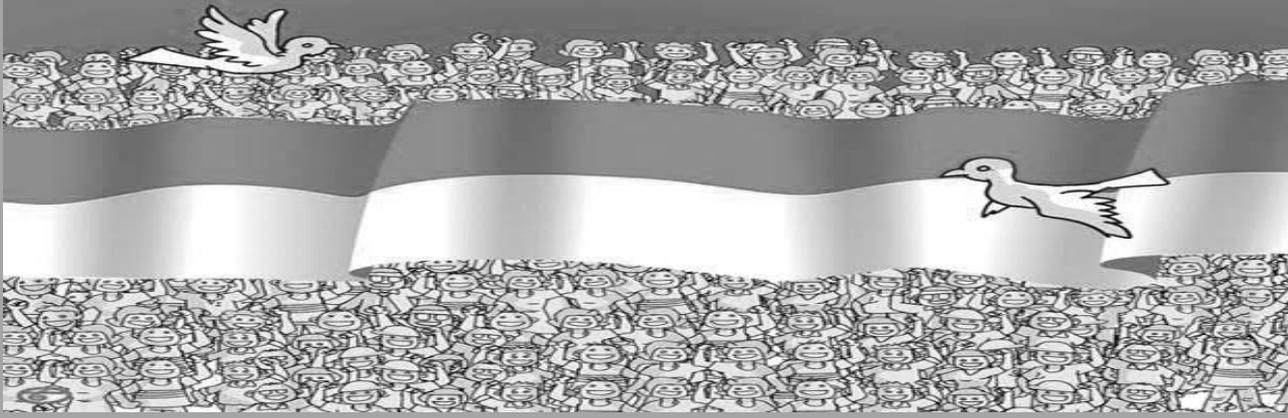


PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2015-2016

Demokrasi Untuk Semua



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**



PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2015-2016

Demokrasi Untuk Semua



Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 - 2016

ISBN. 978-602-61549-4-1

No. Publikasi : 14520.1705

Katalog BPS : 4601004.14

Ukuran Buku : 17 Cm x 24 Cm

Jumlah Halaman : 60 (x + 50 halaman)

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015-2016 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berisi berbagai data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau. Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015-2016 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi yang sudah terbit secara rutin setiap tahun.

Materi yang disajikan dalam Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2016 ini, terutama didasarkan atas hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang memuat berbagai informasi mengenai indikator-indikator demokrasi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Provinsi Riau. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di Provinsi Riau relatif dapat digambarkan dengan lebih jelas. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, terutama di bidang politik.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Pekanbaru, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Ir. Aden Gultom, MM

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Ir. Aden Gultom, MM

Editor :

Siti Mardiyah, MA

Emilia Dharmayanthi, SST

Penulis :

Emilia Dharmayanthi, SST

Dwijotulus Saputro, SE

Pengolah Data :

Dwijotulus Saputro, SE

Setting :

Dwijotulus Saputro, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Organisasi Penulisan	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Demokrasi Global	3
1.2 Urgensi Demokrasi di Indonesia	3
1.2.1 Apa Itu IDI?	4
1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?	5
1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia	6
1.3.1 Kerangka Konseptual IDI	6
1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>)	7
1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	8
1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>)	9
1.3.2 Metodologi IDI	10
1.3.2.1 Review Media dan Dokumen	11
1.3.2.2 <i>Focused Group Discussion</i> (FGD)	12
1.3.2.3 <i>Indepth Interview</i>	12
1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi	13
BAB II PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015-2016	19
2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2016	21
2.2 Indeks Kebebasan Sipil	23
2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	25

2.2.2	Variabel Kebebasan Berpendapat	27
2.2.3	Variabel Kebebasan Berkeyakinan	28
2.2.4	Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	29
2.3	Indeks Hak-Hak Politik	30
2.3.1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih	31
2.3.2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	34
2.4	Indeks Lembaga Demokrasi	35
2.4.1	Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	38
2.4.2	Variabel Peran DPRD	40
2.4.3	Variabel Peran Partai Politik	41
2.4.4	Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	42
2.4.5	Variabel Peran Peradilan yang Independen	43
BAB III	KESIMPULAN	47
	DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil 14
Tabel 1.2	Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik 16
Tabel 1.3	Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi 17
Tabel 2.2.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil ... 25
Tabel 2.2.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 26
Tabel 2.2.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat 28
Tabel 2.2.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan 29
Tabel 2.2.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi ... 30
Tabel 2.3.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik ... 31
Tabel 2.3.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih 32
Tabel 2.3.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 35
Tabel 2.4.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi 36
Tabel 2.4.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil 39
Tabel 2.4.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD 40
Tabel 2.4.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik 41
Tabel 2.4.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah 42
Tabel 2.4.6	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen 43

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2012 – 2015	21
Grafik 2.1.2 Sebaran Nilai Aspek IDI Provinsi Riau, 2009 – 2015	22
Grafik 2.3.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	34
Grafik 2.4.1 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2009 dan 2014.....	39



PENDAHULUAN

<https://riau.bps.go.id>

WHAT'S??

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang country specific: yang dibangun dengan latar belakang perkembangan social politik Indonesia

Mengapa IDI Diperlukan?

Pertama : secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

Kedua : bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang dilakukan daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi yang bersangkutan.



SKALA KINERJA DEMOKRASI

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi, digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normative dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

- Kinerja demokrasi “Baik” (Indeks > 80)
- Kinerja demokrasi “Sedang” (Indeks 60 – 80)
- Kinerja demokrasi “Buruk” (Indeks < 60)



1.1 Perkembangan Demokrasi Global

Akhir-akhir ini masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik terkait dengan perkembangan demokrasi global. Pertama, terjadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang sering disebut sebagai *The Arab Spring* ini telah menurunkan rezim-rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang sah.

Kedua, pada kurun waktu yang sama, banyak negara yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang sebelumnya justru mengalami kemerosotan kualitas demokrasi. Kecenderungan kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic recession*) atau penurunan kualitas demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi.

1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran

praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas.

1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Sekarang, setelah sembilan belas tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di

Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para pengambil kebijakan dibidang politik, pendidikan termasuk mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses *deliberasi* perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Bab ini akan menyajikan konseptualisasi dan konstektualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang

yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (variabel ke - 1)
- 2) Kebebasan Berpendapat, (variabel ke - 2)
- 3) Kebebasan Berkeyakinan, (variabel ke - 3)
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, (variabel ke - 4).

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Political Rights merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, (variabel ke - 5)
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, (variabel ke - 6).

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel kelima, dan 2 indikator pada variabel keenam.

1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil, (variabel ke - 7)
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (variabel ke - 8)

- 3) Peran Partai Politik, (variabel ke - 9)
- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, (variabel ke - 10)
- 5) Peradilan yang Independen, (variabel ke - 11).

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sebelas indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel ketujuh, kesembilan, sepuluh, dan sebelas, serta tiga indikator pada variabel kedelapan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2015 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Informasi lebih rinci tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3.

1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan

untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologis di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: *review media*/telaah media (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi terarah terbatas, dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka

di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih dari KPU.

1.3.2.2 *Focused Group Discussion (FGD)*

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah **pertama**, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen.

Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. **Ketiga**, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

1.3.2.3 *Indepth Interview*

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses

pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (*review* media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui *review* media dan dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau, digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 0 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “**baik**” (indeks > 80), “**sedang**” (indeks 60 – 80) dan “**buruk**” (indeks < 60).

Tabel 1.1

Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil

Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Variabel II : Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator 4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi**Indikator 8**

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Tabel 1.2

Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik

Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih

Indikator 11

Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

Indikator 12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

Indikator 13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator 14

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

Indikator 15

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator 16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Indikator 17

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.3**Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi****Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil****Indikator 18**

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

Indikator 19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Variabel VIII : Peran DPRD**Indikator 20**

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Total APBD.

Indikator 21

Persentase Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

Indikator 22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Variabel IX : Peran Partai Politik**Indikator 23**

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Indikator 24

Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol tingkat provinsi.

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator 25

Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN.

Indikator 26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah.

Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen

Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial.

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.



PROFIL IDI RIAU
Tahun 2015 - 2016

<https://riau.bps.go.id>

PROFIL

Demokrasi Riau

2015 - 2016



VARIABEL



Kebebasan Sipil

71,78



Hak-Hak Politik

77,98



Lembaga Demokrasi

62,34

2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015–2016

Bab ini menguraikan hasil Indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2016. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2016

Pada tahun 2016, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 71,89. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong “sedang”. Untuk membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009-2016, dapat dilihat pada Grafik 2.1.1.

Grafik 2.1.1

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009-2016

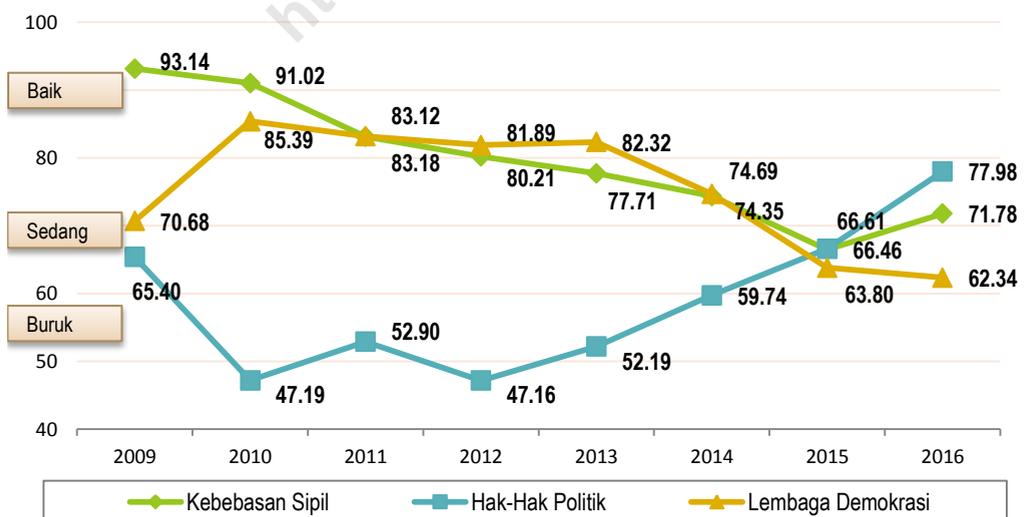


Bila dibandingkan dengan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau pada tahun 2015 (65,83), dengan tahun 2016 (71,89) nilai indeks Provinsi Riau mengalami kenaikan tetapi belum mengubah kategori kualitas capaian kinerja demokrasi menjadi kategori “baik”. Indeks demokrasi tersebut merupakan perkiraan berdasarkan metodologi yang valid dari kinerja demokrasi di Provinsi Riau.

Grafik 2.1.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2009-2016. Pola sebaran capaian ketiga aspek setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2016, Hak-Hak Politik merupakan aspek dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Kebebasan Sipil Lembaga Demokrasi.

Grafik 2.1.2

Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2016



Capaian aspek Lembaga Demokrasi tahun 2016 perlu mendapat perhatian khusus, karena sejak tahun 2009 hingga 2016, indeks aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Riau mencapai angka terendah, dan sejak tahun 2014 terjadi penurunan kategori kualitas Lembaga Demokrasi, dari kualitas “baik” menjadi “sedang”. Capaian aspek Kebebasan Sipil tahun 2016 juga tergolong dalam kategori “sedang”, sementara capaian aspek Hak-hak Politik sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2016. Capaian kualitas Hak-Hak Politik di tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015 menjadi kategori “sedang”.

Bila dilihat kecenderungan indeks dalam ketiga aspek, aspek Kebebasan Sipil terus menunjukkan penurunan dari 93,14 pada tahun 2009 menjadi 66,46 pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 71,78. Aspek Hak-Hak Politik sebaliknya, justru terus menunjukkan peningkatan dari 47,16 pada tahun 2012 menjadi 77,98 pada tahun 2016. Sementara aspek Lembaga Demokrasi masih menunjukkan penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

2.2 Indeks Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil IDI mengukur kebebasan individu dan kelompok dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil IDI 2016 Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 5,32 poin, dari 66,46 pada tahun 2015 menjadi 71,78

pada tahun 2016, dimana nilai indeks aspek Kebebasan Sipil masih berada pada posisi kategori “sedang”. Kebebasan sipil tahun 2016 sudah meningkat dimana tahun sebelumnya dari 2009 – 2015 selalu menunjukkan penurunan hingga meluncur ke angka 60, dan di tahun 2016 kualitas kinerja aspek Kebebasan Sipil sudah mulai meningkat ke angka 70, tetapi masih berada pada kategori “sedang”.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” (97,66), “Kebebasan Berpendapat” (39,59), “Kebebasan Berkeyakinan” (77,69), dan “Kebebasan dari Diskriminasi” (60,80). Dibanding IDI 2015, nilai indeks keempat variabel dalam aspek Kebebasan Sipil IDI 2015, satu variabel mengalami peningkatan yaitu variabel Kebebasan Berkeyakinan, satu variabel tidak mengalami perubahan yaitu variabel Kebebasan dari Diskriminasi dan dua variabel mengalami penurunan yaitu Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan variabel Kebebasan Berpendapat.

Tabel 2.2.1 menggambarkan sebaran nilai keempat variabel pada aspek Kebebasan Sipil IDI 2016 serta perbandingannya dengan IDI 2015. Hasil IDI 2016 dibandingkan dengan hasil IDI 2015, capaian nilai indeks aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau naik 5,32 poin, dan kenaikan nilai indeks tersebut disumbang oleh variabel Kebebasan Berkeyakinan yang indeksinya naik sebanyak 13,55 poin. Sementara variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat turun 2,34 poin, dan variabel Kebebasan Berpendapat turun 25,7 poin, sedangkan variabel Kebebasan dari Diskriminasi tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil

Variabel	2015	2016
		66,46
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	97,66
Kebebasan Berpendapat	65,29	39,59
Kebebasan Berkeyakinan	64,14	77,69
Kebebasan dari Diskriminasi	60,80	60,80

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” tahun 2016 sebesar 97,66 disumbang oleh nilai skor dua indikator yang terdapat di dalamnya. Pertama, indikator yang menjelaskan Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Daerah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat dengan nilai 100,00. Kedua, skor indikator yang menjelaskan Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan oleh Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat dengan nilai 81,25.

Tabel 2.2.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2015	2016
		100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	81,25

Tabel 2.2.2 memperlihatkan nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” di Provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 97,66 pada tahun 2016 dibandingkan dengan skor tahun 2015 yaitu 100,00. Indikator yang mengalami penurunan terhadap variabel, adalah indikator Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 81,25, sedangkan indikator Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada nilai 100,00.

Dibandingkan tahun 2015, hasil IDI 2016 mengindikasikan perilaku pemerintah daerah yang tetap menggunakan cara-cara berdialog dalam komunikasi mereka dengan masyarakat. Sementara, perilaku masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami kendala. Artinya, selama tahun 2016 hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat masih mengalami hambatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel “Kebebasan Berpendapat” di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah sebesar 39,59. Dibandingkan dengan IDI 2015, nilai variabel Kebebasan Berpendapat tahun 2016 turun cukup tajam hingga sebesar 25,70 poin, dari 65,29 pada 2015. Penurunan nilai indeks variabel Kebebasan Berpendapat menggambarkan kualitas kinerja variabel dari kinerja kategori “sedang” menjadi kinerja “buruk” pada tahun 2016.

Nilai yang turun tersebut disebabkan oleh nilai skor yang turun pada kedua indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat turun sebanyak 20,83 poin di mana nilainya pada tahun 2015 sebesar 58,33 menjadi 37,50 pada tahun 2016. Sementara skor indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat mengalami penurunan sangat tajam sebanyak 50,00 poin dimana nilai tahun 2015 sebesar 100,00 menjadi sebesar 50,00 tahun 2016. Kedua Skor indikator ini yang menyebabkan variabel kebebasan berpendapat menjadi kategori “buruk” dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berpendapat

Variabel Kebebasan Berpendapat	2014	2015
		65,29
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	58,33	37,50
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat yang cukup tajam tersebut mengindikasikan semakin banyaknya kejadian penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat pemenuhan hak asasi warga terkait dengan kebebasan berpendapat.

2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 13,55 poin, dari 64,14 pada tahun 2015 menjadi 77,69 pada tahun 2016. Nilai variabel tersebut didukung oleh skor tiga indikator di dalamnya. Seperti dikemukakan Tabel 2.2.4, peningkatan nilai indeks dalam variabel ini terjadi akibat naiknya nilai dari dua indikator, sementara satu indikator lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2.2.4
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Variabel	2015	2016
		64,14
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	65,22	78,26
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	0,00	62,50
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	85,00

2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Dibandingkan hasil IDI 2015, nilai indeks variabel “Kebebasan dari Diskriminasi” di Provinsi Riau pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan (lihat Tabel 2.2.5). Nilai variabel tersebut disumbang oleh tiga indikator di dalamnya.

Pertama, nilai indikator tentang Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sebesar 0,00 pada tahun 2016. Kedua, nilai indikator Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sebesar 100,00. Ketiga, nilai indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sebesar 100,00.

Tabel 2.2.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan dari
Diskriminasi

Variabel	2015	2016
		60,80
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	0,00	0,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00

2.3 Indeks Hak-Hak Politik

Nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau sejak tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 52,19 tahun 2013, menjadi 59,74 pada tahun 2014, dan 66,61 tahun 2015 dan 77,98 pada tahun 2016. Indeks Hak-Hak Politik tahun 2016 meningkat sebesar 11,37 poin dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai indeks ini di tahun 2016 secara statistik cukup signifikan tetapi belum mampu mengubah gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik kategori “sedang” menjadi kategori “baik”.

Sebelum tahun 2015 gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik di Riau cukup memprihatinkan. Indeks Hak-Hak Politik yang cukup rendah secara umum menyiratkan kemungkinan adanya stagnasi dalam pemenuhan hak-hak politik. Namun pada tahun 2016 nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau (77,98) merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan dua

2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015–2016

aspek IDI lainnya. Artinya pemenuhan akan hak-hak politik masyarakat Riau sudah mulai menjadi prioritas pemerintah.

Meningkatnya nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2016 tersebut disebabkan oleh naiknya nilai indeks satu variabel yang ada dalam aspek Hak-Hak Politik, yakni "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" yang nilai indeksnya 80,43, atau naik 22,82 poin dan "Hak Memilih dan Dipilih" nilai indeksnya 75,53, atau turun 0,07 poin, lebih rendah dari nilai indeks variabel yang pertama (lihat Tabel 2.3.1).

Tabel 2.3.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik

Variabel	2015	2016
		66,61
Hak Memilih dan Dipilih	75,60	75,53
Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	57,61	80,43

Di dalam aspek Hak-Hak Politik terdapat dua variabel yakni "Hak Memilih dan Dipilih" yang mempunyai lima indikator dan "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" yang mempunyai dua indikator.

2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks variabel "Hak Memilih dan Dipilih" di Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding nilai indeks pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,07 poin, dari 75,60 pada tahun 2015 menjadi 75,53 pada

tahun 2016 (lihat Tabel 2.3.2). Nilai variabel tersebut disumbang oleh lima indikator yang terdapat di dalamnya.

Tabel 2.3.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Variabel	2015	2016
		75,60
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	97,44	97,44
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	68,82	68,82
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	69,48	69,48
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	92,31	92,31

Empat dari lima indikator dalam variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yaitu indikator pertama sampai dengan indikator keempat terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu seperti tahun 2009, data dari empat indikator tersebut dikumpulkan lagi pada tahun 2014 (perkembangannya lihat Grafik 2.3.1).

Indikator pertama adalah “Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat” dengan skor 97,44 pada tahun 2014, meningkat 3,21

2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015–2016

poin dari skor tahun 2009 yaitu 94,23. Artinya kejadian yang menghambat hak memilih dan dipilih masyarakat semakin berkurang.

Indikator kedua adalah “Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih” dengan skor 60,00 pada tahun 2014, meningkat 10 poin dari skor tahun 2009 yaitu 50,00. Artinya, pemerintah dapat memfasilitasi kelompok penyandang cacat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

Indikator ketiga adalah “Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)” dengan skor 68,82 pada tahun 2014, meningkat 38,82 poin dari skor tahun 2009 yaitu 30,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas DPT di Provinsi Riau berada pada kategori “sedang”, namun kualitas DPT Tahun 2014 sudah lebih baik dari kualitas DPT tahun 2009. Peningkatan kualitas DPT tahun 2014 membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

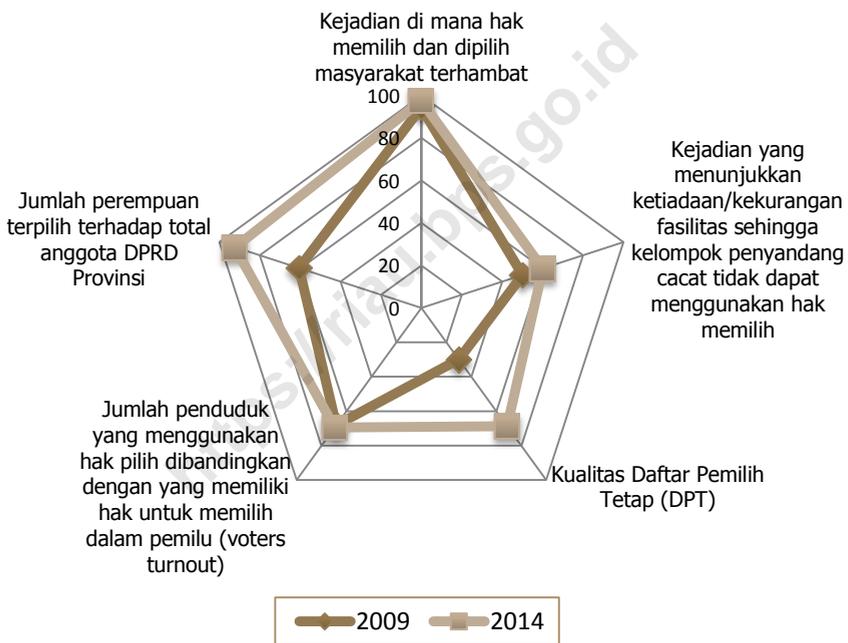
Indikator keempat adalah “Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)” dengan skor 69,48 pada tahun 2014, meningkat 1,37 poin dari skor tahun 2009 yaitu 68,11. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya sudah semakin meningkat.

Sedangkan Indikator kelima, yakni “Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi” dengan skor 92,31 pada tahun 2016, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2015. Indikator ini merupakan indikator yang pengumpulan datanya dilakukan setiap tahun, tidak terkait dengan tahun penyelenggaraan pemilu. Data dikumpulkan dengan mencatat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi pada tahun

abservasi. Perubahan dalam jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi terjadi karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).

Grafik 2.3.1

Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” pada tahun 2016 yaitu 80,43, mengalami peningkatan sebesar 22,82 poin dibandingkan dengan tahun 2015 yang nilainya 57,61 (lihat Tabel 2.3.3). Nilai variabel tersebut disumbang oleh satu indikator yang

terdapat di dalamnya dan satunya lagi masih pada posisi yang sama seperti pada tahun 2015.

Dari Tabel 2.3.3 terlihat bahwa penyebab meningkatnya nilai indeks untuk variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” adalah naiknya nilai indikator “Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan” sebesar 45,65 poin, dimana nilainya pada tahun 2015 adalah 15,22 dan pada tahun 2016 nilainya menjadi 60,87. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya jumlah kejadian demonstrasi/mogok yang berujung pada tindak kekerasan.

Tabel 2.3.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Variabel	2015	2016
		57,61
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	15,22	60,87
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00

2.4 Indeks Lembaga Demokrasi

Dibandingkan dengan capaian indeks tahun 2015, secara agregat, aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,46 poin (dari 63,80 pada tahun 2015 menjadi 62,34 pada tahun 2016), yang artinya capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016 menempatkan kinerja aspek ini masih pada kategori “sedang”.

Penurunan nilai indeks ini perlu dicermati karena untuk kedua kalinya nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi masih di angka 60.

Penurunan nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016, antara lain dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi dari nilai indeks masing-masing variabel dan skor indikator pada aspek yang bersangkutan. Secara khusus, bila dicermati distribusi nilai indeks lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu: "Pemilu yang Bebas dan Adil", "Peran DPRD", "Peran Partai Politik", "Peran Birokrasi Pemerintah", dan "Peran Peradilan Independen", terlihat dengan jelas bahwa satu-satunya variabel yang telah memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016 adalah turunnya capaian indeks variabel "Peran Peradilan yang Independen" sebesar 28,13 poin, yaitu dari 78,13 pada tahun 2015 menjadi 50,00 pada tahun 2016. Sedangkan tiga variabel lainnya yang capaian indeksnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan satu variabel masih di angka yang sama seperti tahun 2015 yakni pada indikator Pemilu yang Bebas dan Adil, dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel	2015	2016
	63,80	62,34
Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14
Peran DPRD	45,17	47,96
Peran Partai Politik	84,02	99,22
Peran Birokrasi Pemerintah	29,78	35,85
Peran Peradilan yang Independen	78,13	50,00

Merujuk pada Tabel 2.4.1, sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk digaris bawahi terkait dengan konfigurasi angka-angka indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi.

Pertama, walaupun dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2016 capaian nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi masih cenderung menunjukkan penurunan, dan secara kualitatif, capaian kinerja pada kurun waktu 2015-2016 masih tetap berada pada posisi yang sama, yaitu pada kategori kinerja “sedang”. Namun untuk kedua kalinya capaian kinerja Lembaga Demokrasi hingga pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga meski mendekati ke angka 60.

Kedua, walaupun selama empat tahun terakhir nilai variabel “Peran DPRD” menunjukkan tren meningkat, namun Peran DPRD merupakan satu-satunya variabel yang secara konstan berada pada kategori kinerja “buruk” dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2009 hingga tahun 2016. Tahun 2016 juga merupakan tahun dimana capaian indeks kedua terendah terkait variabel ini.

Ketiga, menarik untuk dicatat bahwa variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” yang sebelum tahun 2015 selalu berada pada kategori “baik”, namun untuk kedua kalinya pada tahun 2016 capaian variabel ini masih pada kategori “buruk” walaupun tahun 2016 sudah mulai meningkat ke angka 35,85 dari 29,78 di tahun 2015. Akan tetapi, perubahan capaian yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan dua indikator yang menyusun variabel tersebut. Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai indeks dari variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah 91,14. Nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, variabel ini hanya dikumpulkan pada tahun 2009 dan 2014 dengan demikian nilai variabel pemilu yang bebas dan adil 2016 akan sama dengan tahun 2015.

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yaitu:

pertama, indikator “Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu” di mana nilainya pada tahun 2016 adalah 100,00, sama dengan nilai indikator pada tahun 2015.

Kedua, indikator “Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara” di mana nilainya pada tahun 2016 adalah 82,28, juga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, perkembangan variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” dari tahun 2015 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik 2.4.2.

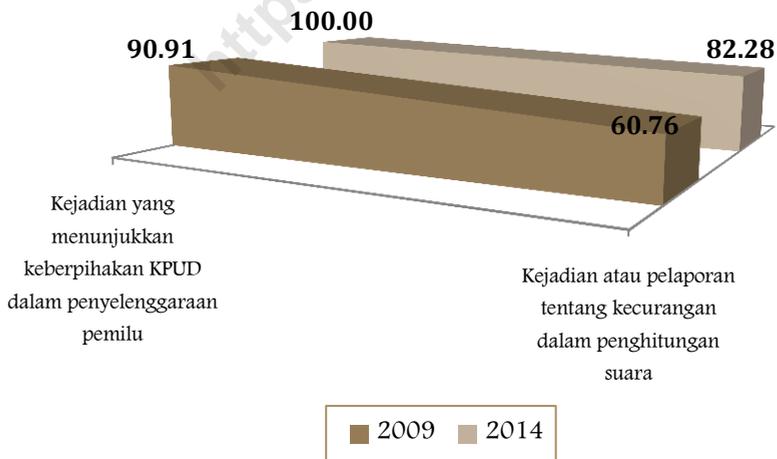
Tabel 2.4.2

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Variabel	2015	2016
		91,14
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	82,28	82,28

Grafik 2.4.1

Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel "Pemilu yang Bebas dan Adil" yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.4.2 Variabel Peran DPRD

Nilai indeks variabel “Peran DPRD” di Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami peningkatan. Penyebab meningkatnya nilai indeks variabel “Peran DPRD” pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dalam dimensi kuantitatif, dapat dijelaskan oleh capaian skor tiga indikator, di mana satu di antaranya mengalami penurunan, dan dua indikator lainnya mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.4.3).

Satu indikator yang masih tetap dan tidak mengalami perubahan adalah “Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif” di mana nilai skor indikator pada tahun 2015 adalah 0,00 masih tetap diangka 0,00 pada tahun 2016.

Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan adalah: (a) “Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan” terjadi kenaikan sebesar 10,99 poin dari tahun 2015 ke tahun 2016; (b) “Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan” mengalami penurunan sebesar 38,89 poin dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Tabel 2.4.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran DPRD

Variabel	2015	2016
	45,17	47,96
Alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD	55,80	66,79
Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	53,85	25,00
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	0,00

2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” di Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,20 poin (lihat Tabel 2.4.4). Dua indikator yang mempengaruhi kenaikan nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” adalah: (a) indikator “Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu” yang pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,29 poin dibandingkan dengan tahun 2015; (b) indikator “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi” yang pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 23,41 poin dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 2.4.4

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Partai Politik

Variabel	2015	2016
	84,02	99,22
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	85,71	100,00
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	68,74	92,15

Capaian kinerja variabel “Peran Partai Politik” pada tahun 2016 masih pada level “baik”. Demikian juga capaian kinerja untuk dua indikator yang mempengaruhi variabel “Peran Partai Politik”, kedua indikator berada pada level “baik” yaitu indikator “Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu” dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi”. Hal ini berarti peran partai politik pada tahun 2016 sudah

menunjukkan hasil yang maksimal dalam memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai indeks dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah sebesar 35,85, naik sebesar 6,07 poin jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 29,78. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.4.5.

Tabel 2.4.5

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Variabel	2015	2016
	29,78	35,85
Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh keputusan PTUN	55,26	28,95
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	41,66

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” yaitu: **pertama**, indikator “Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh keputusan PTUN” mengalami penurunan sebesar 26,31 poin pada tahun 2016, dimana nilai skor indikator pada tahun 2015 adalah 55,26 menjadi 28,95 pada tahun 2016. **Kedua**, indikator “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” mengalami peningkatan sebesar 33,33

2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015–2016

poin dibandingkan dengan nilai skor indikator tahun 2015 hanya 8,33 naik menjadi 41,66.

2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai indeks dari variabel “Peran Peradilan yang Independen” di Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai indeks pada tahun 2015, dimana nilai indeks variabel ini pada tahun 2016 adalah 50,00, turun 28,13 poin dari nilai pada tahun 2015 yaitu 78,13. Secara kualitatif, penurunan nilai indeks ini juga mengakibatkan variabel “Peran Peradilan yang Independen” dari level “sedang” pada tahun 2015 menjadi level “buruk” pada tahun 2016.

Tabel 2.4.6

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Peradilan yang Independen

Variabel	2015	2016
	78,13	50,00
Keputusan hakim yang kontroversial	56,25	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00

Dari Dua indikator “Peran Peradilan yang Independen”, yaitu: **pertama**, indikator “Keputusan Hakim yang Kontroversial” nilainya naik sangat signifikan menjadi 100,00. Secara kualitatif, capaian skor indikator ini mengalami kenaikan dari level “buruk” pada tahun 2015 menjadi level “baik” pada tahun 2016.

Kedua, indikator “Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi” di mana nilainya pada tahun 2016 adalah 0,00 turun sebanyak 100,00 poin dibandingkan dengan nilai indeks pada tahun 2015 sebesar 100,00 (lihat Tabel 2.4.6). Secara kualitatif, capaian skor indikator ini juga mengalami penurunan dari level “baik” pada tahun 2015 menjadi level “buruk” pada tahun 2016. Indikator ini pula lah yang menyebabkan turunnya nilai indeks variabel “Peran Peradilan yang Independen” Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja peradilan (penegak hukum) dalam menyelesaikan berbagai macam kasus pidana di Provinsi Riau perlu mendapat perhatian serius.

3

KESIMPULAN

<https://riau.bps.go.id>



Kebebasan Berkumpul dan Berserikat



Capaian Kinerja "Baik"



Kebebasan Berpendapat



Capaian Kinerja "Buruk"



Kebebasan Berkeyakinan



Capaian Kinerja "Sedang"



Kebebasan dari Diskriminasi



Capaian Kinerja "Sedang"



Hak Memilih dan Dipilih



Capaian Kinerja "Sedang"



Partisipasi politik dalam pengambilan Keputusan dan Pengawasan



Capaian Kinerja "Baik"



Pemilu Bebas dan Adil



Capaian Kinerja "Baik"



Peran DPRD



Capaian Kinerja "Buruk"



Peran Partai Politik



Capaian Kinerja "Baik"



Peran Birokrasi Pemerintah



Capaian Kinerja "Buruk"



Peran Peradilan yang Independen



Capaian Kinerja "Buruk"

Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2016 memperlihatkan gambaran dan kecenderungan perkembangan demokrasi di Provinsi Riau yang penting untuk dicermati. **Pertama**, meskipun dari agregasi capaian keseluruhan aspek dan kualitas demokrasi di Provinsi Riau pada umumnya tergolong pada kategori “sedang”, hampir semua aspeknya sudah semakin naik dibandingkan tahun 2015 namun masih dalam kategori “sedang”. **Kedua**, pada aspek Kebebasan Sipil terjadi pencapaian demokrasi di Riau yang sudah menunjukkan kenaikan dimana tahun sebelumnya mengalami penurunan. Tetapi masih dalam kategori “sedang” (lihat Grafik 2.1.2).

Dapat dipastikan bahwa naiknya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mencerminkan adanya perbaikan dalam konsolidasi demokrasi di Provinsi Riau. Namun masih terdapat hambatan yang cukup serius, yaitu dalam upaya pemenuhan hak asasi warga terkait kebebasan berpendapat hambatan tersebut datang dari aparat pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, Meningkatnya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil jelas mengindikasikan surplus demokrasi. Kondisi kebudayaan dan struktur politik belum sepenuhnya demokratis. Secara formal-struktural kita memiliki lembaga demokrasi yang lengkap berupa Pemilu, Partai Politik, Parlemen, Peradilan, tapi masalahnya, nilai-nilai yang melandasi lembaga demokrasi tersebut belum sepenuhnya demokratis. Demokrasi adalah sistem politik yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan martabat manusia sebagai warga negara melalui pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Keberhasilan demokrasi terukur dari seberapa jauh pemenuhan hak-hak asasi warga negara sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap martabat manusia.

Sementara itu, pada tahun 2016 aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau justru menunjukkan indeks paling tinggi di antara ketiga aspek. Indeks Hak-Hak Politik termasuk ke dalam kategori “sedang” karena nilainya lebih besar dari 60. Naiknya capaian kinerja indeks Hak-Hak Politik disebabkan berkurangnya intensitas demonstrasi yang bersifat kekerasan di Provinsi Riau. Demonstrasi memang merupakan hak politik rakyat dalam demokrasi, namun haruslah dilakukan secara damai karena demonstrasi adalah proses penyampaian aspirasi/ kepentingan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi menuntut proses penyampaian itu dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum dan pengrusakan terhadap barang-barang milik publik.

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, merupakan faktor penyebab lain bagi capaian indeks aspek Hak-Hak Politik. Demokrasi menuntut adanya warga masyarakat yang peka terhadap kepentingan publik dan menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah agar pemerintah dapat memperbaiki hal tersebut. Semakin besar jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, semakin baik perkembangan demokrasi di Provinsi Riau.

Demikian pula halnya dengan indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016, merupakan capaian indeks terendah di antara ketiga aspek IDI yang menempatkan kinerja Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau pada kategori “sedang”.

Sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk dicatat terkait dengan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016, beserta

indeks variabel-variabel yang ada di dalamnya. **Pertama**, walaupun dalam dimensi kuantitatif capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015 hingga tahun 2016 masih mengalami penurunan, namun secara kualitatif capaian kinerja lembaga demokrasi pada tahun 2015-2016 masih berada pada kategori kinerja “sedang”.

Kedua, “Peran DPRD” meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, namun variabel ini adalah variabel yang secara konstan masih berada pada kategori kinerja “buruk” selama periode pengukuran IDI 2009-2016 di Provinsi Riau dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks selama beberapa tahun terakhir pengukuran IDI.

Ketiga, variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” adalah variabel yang konsisten dengan capaian indeks tertinggi selama 2009-2014, yang selanjutnya telah memposisikan kinerja dari variabel ini termasuk kategori “baik” pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Namun tahun 2015 capaian indeks variabel ini menurun sangat signifikan yang diakibatkan oleh perubahan indikator yang menyusun variabel tersebut. Namun demikian pada tahun 2016 variabel ini mulai meningkat ke angka 35,85 Meskipun mengalami peningkatan variabel ini masih dalam kategori “buruk”.

Keempat, variabel “Peran Peradilan yang Independen” variabel ini juga menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, ini dilihat dari indikator Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi turun menjadi ke angka 0,00 di tahun 2016 dimana tahun sebelumnya mencapai ke angka 100,00.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042-21336, Fax : (0761) 21336
E-mail : bps1400@bps.go.id